



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR 100.4.1 - 423 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.4.1 – 062 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan usulan pengajuan Rancangan Peraturan Bupati dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, perlu memasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan beberapa Rancangan Peraturan Bupati batal diajukan dalam Propemperda Tahun 2025, maka Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.4.1 – 062 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 124).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sigi Nomor 100.4.1 – 062 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.4.1 – 215 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sigi Nomor 100.4.1 – 062 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.4.1 – 062 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Sigi Nomor 100.4.1 – 062 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.4.1 – 215 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sigi Nomor 100.4.1 – 062 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 22 Oktober 2025



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi;
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sigi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SIGI
 NOMOR 100.4.1 - 423 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
 100.4.1 – 062 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI
 TAHUN 2025

DAFTAR PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	Perkada	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1. Penilaian PBB-P2 2. Penghitungan penilaian PBB-P2	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	- Bapenda - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 7 ayat (7) Perda Nomor 11 Tahun 2023
2.	Perkada	Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa	1. Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa; 3. Penggunaan penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Pelaporan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 6. Pembinaan dan pengawasan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	- Bapenda - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 97 ayat (3) Perda Nomor 11 Tahun 2023

3.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Besaran persentase PBB-P2; 2. Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial; 3. Fasilitas Pendidikan dalam pajak air tanah; 4. Besarnya nilai perolehan air tanah; 5. Masa pajak dan tahun pajak; 6. Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak dan retribusi; 7. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi; dan 8. Tata cara pengenaan sanksi administratif.	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	- Bapenda - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 8 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (5), Pasal 76 ayat (5), Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 124 ayat (6)Perda Nomor. 11 Tahun 2023
4.	Perkada	Tata Cara Pemberian Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dan Prosedur Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	1. Dokumen Andalalin; 2. Mekanisme persetujuan Andalalin; 3. Pengawasan hasil Andalalin; dan 4. Pengawasan, penilaian dan implementasi Andalalin.	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas		√	- Dinas Perhubungan - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 10 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2021
5.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1. Tata cara pemberian sanksi administratif; 2. Bentuk dan petugas penanganan serta tata cara Rehabilitasi; 3. Tata cara wajib lapor ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan 4. pemberian penghargaan	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika		√	- Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Satpol PP - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 11 ayat (7), Pasal 12 ayat (7), Pasal 15 ayat (6), Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2023

6.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol	1. Tata cara pengenaan sanksi administratif untuk Perusahaan; 2. Tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pengecer; dan 3. Tata cara pengenaan sanksi administratif untuk perseorangan yang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional.	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol		√	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TW 1	Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (3) Perda Nomor 9 Tahun 2023
7.	Perkada	Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Puskesmas	1. Pembentukan dan Kedudukan 2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 3. Kelompok Jabatan Fungsional 4. Tata Kerja 5. Kepegawaian dan Jabatan	√		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat		√	- Dinas Kesehatan - Bagian Organisasi - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024
8.	Perkada	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Dokumen SOP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kab. Sigi	1. Penambahan SOP Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di RSUD Torabelo; dan 2. Penambahan SOP Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di Puskesmas		√	PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah		√	- Dinas Kesehatan - RSUD Torabelo - Bagian Organisasi - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 1 PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012
9.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena	1. Besaran Program bidang pendidikan 2. Besaran biaya Program bidang kesehatan 3. Bentuk dan tata cara pelaksanaan Program bidang Perlindungan Sosial 4. Persyaratan penerima manfaat Program Bidang Pendidikan 5. Persyaratan penerima manfaat Program bidang kesehatan 6. Persyaratan Penerima manfaat Program Bidang Perlindungan Sosial 7. Mekanisme pelaksanaan Program	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena		√	- Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bagian Kesra - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (7), Pasal 13, Pasal 18 ayat (4), Pasal, Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 28, Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (4)

			8. Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat 9. Tata cara pelaksanaan peran serta dunia usaha 10. Pemberian penghargaan 11. Tata cara monitoring dan evaluasi						-		
10.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	1. Tata Cara pelibatan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa 2. Kriteria bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi 3. Kriteria wilayah daerah dengan bidang dan sektor usaha yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya 4. Besaran biaya layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro 5. Tata cara pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro 6. tata cara pemberian insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan 7. Tata cara pelaksanaan pola kemitraan 8. Tata cara pelaksanaan pembiayaan 9. Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Inkubasi	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro		√	- Dinas Koperasi, UKM - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 10, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2023

11.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi	1. Perubahan Pasal 5 2. Perubahan Pasal 6 3. Perubahan Pasal 7 4. Perubahan Pasal 8 5. Perubahan Pasal 9 6. Perubahan Pasal 12 7. Perubahan Pasal 16 8. Perubahan Pasal 18 9. Perubahan Pasal 20		√	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		√	- Inspektorat - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 13 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008
12.	Perkada	Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi	1. Remunerasi 2. Fasilitas dan Asuransi 3. Penghentian Pemberian Remunerasi 4. Monitoring dan Evaluasi	√		Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah		√	- RSUD Tora Belo - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 24 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
13.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital Bylaws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi	1. Perubahan Pasal 5 Visi dan Misi 2. Perubahan Pasal 8 Kedudukan dan Keanggotaan		√	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit		√	- RSUD Tora Belo - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
14.	Perkada	Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	1. Tata Nilai Pengadaan 2. Ruang Lingkup Pengadaan 3. Para Pihak 4. Perencanaan Pengadaan 5. Persiapan Pengadaan 6. Pelaksanaan Pengadaan 7. Pembayaran Prestasi Kerja 8. Keadaan Kahar 9. Pemutusan Surat Perjanjian 10. Sanksi 11. Penyelesaian Perselisihan 12. Pelaporan dan Serah Terima 13. Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik	√		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa		√	- Dinas PMD - Inspektorat - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 52 ayat (6) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

15.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	12. Tata cara pemberian sanksi dministratif 13. Struktur organisasi Satlinmas di Desa 14. Persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS 15. Kode Etik PPNS 16. Tata cara pemberian sanksi dministratif 17. Bentuk dan tata cara pembinaan 18. Tata cara penilaian,kriteria, dan besaran penghargaan 19. Tata cara penilaian,kriteria, dan kriteria penghargaan 20. Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat 21. Bentuk dan tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan	√		Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat		√	- Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 50, Pasal 56 ayat (4), Pasal 81 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (4), Pasal 104 ayat (4), Pasal 105 ayat (5), Pasal 106 ayat (4), Pasal 113, Pasal 114 ayat (3),
16.	Perkada	Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Pakaian Dinas ASN 2. Atribut & Kelengkapan Pakaian Dinas 3. Pembinaan dan Pengawasan	√		PMDN Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah		√	- Bagian Organisasi Setda Sigi - Bagian Hukum Setda Sigi	TW 2	
17.	Perkada	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal	1. Pembentukan 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi 3. Tugas dan Fungsi 4. Tata Kerja 5. Kelompok Jabatan 6. Pengangkatan dalam Jabatan		√	1. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2. Perbup Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Satuan Pendidikan Formal		√	- Dinas Pendidikan & Kebudayaan - Bagian Organisasi Setda Sigi - Bagian Hukum Setda Sigi	TW 2	

18.	Perkada	Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi	1. Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi 2. Kerja sama 3. Sosialisasi dan publikasi 4. Peran Pemerintah Daerah 5. Penghargaan 6. Pembiayaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	√		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme		√	- Inspektorat - Bagian Hukum	TW 2	
19.	Perkada	Pedoman Audit Investigasi	1. Maksud dan tujuan 2. Ruang lingkup 3. Pembiayaan 4. Lampiran pedoman umum dan pedoman teknis audit investigasi	√		PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		√	- Inspektorat - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 50 ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2008
20.	Perkada	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Sigi	22. Perubahan Lampiran I s/d Lampiran V		√	PermenpanRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah		√	- Bagian Organisasi - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 6 ayat (1) huruf a PermenpanRB Nomor 39 Tahun 2013
21.	Perkada	Pedoman Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan	1. Penanganan pelaporan pengaduan 2. Pelindungan dan penghargaan Pelapor	√		Permen RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah		√	- Inspektorat - Bagian Hukum	TW 3	Lampiran BAB II Permen RB Nomor 52 Tahun 2014
22.	Perkada	Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Tata Cara Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Pengalokasian ADD 2. Penyaluran ADD 3. Penggunaan ADD 4. Tata Cara Perhitungan Rincian ADD 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 6. Pengelolaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. Pelaporan	√		PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas		√	- DPMD - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana

		Kepada Desa Tahun Anggaran 2026	8. Pembinaan dan Pengawasan			Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa					telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019
23.	Perkada	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1. Tata cara pelaksanaan kewajiban 2. Tata cara pemberian fasilitas 3. Tata cara pemberian sanksi administratif 4. Standar sarana dan prasarana pelayanan keagamaan 5. Tata cara pelaksanaan kewajiban 6. Pemberian advokasi sosial 7. Standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas 8. Besar dan jenis Konsesi 9. Pemberdayaan 10. Pemberian Insentif 11. Tata cara pemberian penghargaan	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		√	- Dinas Sosial - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), Pasal 36 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 47 ayat (3), Pasal 71 ayat (6), Pasal 78 ayat (4), Pasal 83 ayat (4)
24.	Perkada	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas	1. Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah 2. Mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah 3. Jangka waktu 4. Partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan	√		Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		√	- Dinas Sosial - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 10 Perda Nomor 5 Tahun 2024
25.	Perkada	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	√		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		√	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004

						Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.					
26.	Perkada	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.		√	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
27.	Perkada	Tarif Air Minum pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	1. Prinsip dan tujuan 2. Blok konsumsi 3. Kelompok pelanggan 4. Jenis dan ketentuan tarif 5. Tarif 6. Pembayaran rekening	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan		√	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 25 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2016

			7. Penutupan sambungan 8. Pelanggaran dan sanksi			Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum					
28.	Perkada	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	5. Pola Tata Kelola 6. Rencana Strategis 7. Standar Pelayanan Minimal	√		Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah		√	- Dinas Kesehatan - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
29.	Perkada	Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 - 2029	1. Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan 2. Perencanaan dan penganggaran 3. Mekanisme evaluasi terhadap RAD pelayanan kepemudaan 4. Perencanaan dan penganggaran	√		Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan		√	- Dinas Pemuda dan Olahraga - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 9 ayat (3) Perpres Nomor 43 Tahun 2022
30.	Perkada	Desain Olahraga Daerah	1. Penyelenggaraan 2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 3. Pendanaan 4. Perubahan DOD	√		Permenpora Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah		√	- Dinas Pemuda dan Olahraga - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 19 ayat (1) Permenpora Nomor
31.	Perkada	Pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah	1. Strategi pengendalian kecurangan 2. Lingkungan pengendalian kecurangan 3. Perilaku anti kecurangan 4. Satuan tugas pengendalian kecurangan 5. Pembinaan dan pengawasan	√		Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		√	- Inspektorat - Bagian Hukum	TW 3	

32.	Perkada	Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	1. Penyelenggaraan {enugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan 2. Hak dan Kewajiban 3. Pembinaan dan Pengawasan 4. Sanksi	√		Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan		√	- Dinas Kesehatan - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 622 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
33.	Perkada	Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih	1. kewenangan Pemerintah Daerah 2. Pemberdayaan Koperasi 3. Pembentukan satuan tugas 4. Pelindungan Koperasi 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan 6. pembinaan dan pengawasan 7. pendanaan.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		√	- Dinas Koperasi dan UKM - Dinas PMD - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
34.	Perkada	Sewa Kendaraan Dinas untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Objek sewa 2. Klasifikasi dan kapasitas isi Slinder Kendaraan Sewa 3. Perencanaan Sewa Kendaraan 4. Kebutuhan dan pemanfaatan 5. Tata cara dan spesifikasi penyewaan 6. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi	√		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025		√	- BKAD - Bagian Hukum	TW 3	Lampiran Permenkeu Nomor 39 Tahun 2024
35.	Perkada	Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Kewajiban dan larangan 2. Jenis pelanggaran dan hukuman 3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin 4. Tata cara pemeriksaan, penjatuhan hukuman dan penyampaian keputusan 5. Berlakunya hukuman disiplin 6. Upaya administratif.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		√	- BKPSDMD - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018

36.	Perkada	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sigi	Sistematika Renstra Perangkat Daerah	√		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang			- Bapperida - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
37.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan bantuan Sosial	Penambahan pemberian hibah kepada Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan usaha mikro dan usaha kecil		√	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		√	- BKAD - Bagian Hukum	TW 3	Lampiran Bab II Huruf D Angka 2 Huruf e Angka 9) dan Huruf f angka 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
38.	Perkada	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	1. Tahapan penerapan dan penghitungan pencapaian standar pelayanan minimal 2. Koordinasi penerapan SPM 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan SPM 4. Pembinaan dan pengawasan	√		Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal		√	- Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum	TW 4	Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
39.	Perkada	Rencana Aksi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	1. Kewenangan 2. Aksi bersama 3. Perencanaan 4. Pelaksanaan 5. Tanggungjawab Pemerintah Daerah	√		Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal		√	- Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum	TW 4	Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

40.	Perkada	Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rekonstruksi Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Alam, dan Bencana Kebakaran	1. Persyaratan dan prosedur pemberian bantuan 2. Sumber dana	√		Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus	√	- Dinas Perumahan dan Permukiman - Bagian Hukum	TW 4	
41.	Perkada	Indikator Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2025 – 2029	1. Indikator kinerja utama 2. Indikator kinerja daerah 3. Indikator kinerja kunci	√		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama	√	- Bapperida - Bagian Hukum	TW 4	Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007



BUPATI SIGI,

MOHAMAD RIZAL INTJENAE